



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Oktober 2019

Halaman: 1



Permasalahan tata kota masih belum dituntaskan oleh pemerintah. Pemenuhan hak warga sesederhana berjalan kaki, belum dijadikan prioritas. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Lajeng Padmaratri & Muhammad Nadhir Attamimi.

Sabu (5/10) pagi, beberapa warga sudah memulai aktivitasnya di akhir pekan. Jika biasanya Jalan Godean, Sleman pada hari-hari biasa padat dengan kendaraan roda dua, di akhir pekan, kendaraan roda empat tampak mendominasi.

Sekitar pukul 09.10 WIB, perempatan Patran yang menghubungkan Jalan Godean, Jalan Titibumi, dan Jalan Kabupaten, Sleman cukup padat oleh kendaraan roda empat. Dari arah barat sebenarnya masih banyak ruang bagi pengendara motor untuk dapat berhenti di jalur kiri menunggu lampu merah yang menyala. Namun, sepasang pengendara yang berboncengan dengan sepeda motor matik memaksakan motornya untuk masuk ke area pejalan kaki untuk dapat menjangkau bagian *zebra cross*.

Di belakangnya, empat motor bebek lain mengikutinya. Namun, karena sulit untuk turut menjangkau area *zebra cross*, motor-motor ini memenuhi trotoar yang sudah tidak karuan bentuknya. Semennya tercerabik karena terlalu sering dilewati pengendara motor yang tak sabaran.

Pemandangan serupa tampak di perempatan Pingit, Jogja. Persimpangan ini menghubungkan empat ruas jalan, yaitu Jalan Magelang, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Kyai Mojo, dan Jalan

Diponegoro. Bagi warga yang kerap melewati persimpangan ini biasanya mengeluhkan lamanya durasi lampu merah yang menyala karena butuh waktu selama 120 detik.

Dari arah timur, lajur kiri hanya diperuntukkan bagi pengendara yang hendak belok kiri untuk jalan terus. Namun, hal ini membuat pengendara lain yang harus berhenti menjadi tak sabar ingin menunggu di barisan depan. Lantaran lamanya waktu untuk menunggu lampu lalu lintas berubah hijau, beberapa pengendara motor dari arah timur kerap memilih menunggu di trotoar sisi selatan jalan.

Keberadaan satu kantor notaris dan salah satu diler sepeda motor di sisi tersebut membuat trotoar dibuat landai untuk jalan masuk ke dua kantor tersebut. Namun, sayangnya trotoar landai tersebut justru digunakan pengendara motor yang menunggu lampu merah.

Pada pagi itu pun tampak satu orang pengendara ojek daring menunggu *bangjo* sembari mem-berhentikan motornya di bawah pohon yang teduh.

Jika mengacu pada Undang-Undang No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kondisi di Jogja ini masih belum merepresentasikan hak pejalan kaki. Pada pasal 131 tentang Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki, disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

Trotoar Malah...

Pengalihfungsian trotoar tak hanya dilakukan oleh pengendara motor, tetapi juga oleh pedagang kaki lima yang membangun tendanya menutupi seluruh ruas jalur pedestrian.

Sri Wahyu Riyadi, 58, salah seorang pedagang di Jalan Cik Di Tiro, mengaku sudah 30 tahun berjualan rica-rica ayam di sana. Sejak awal, ia menempati trotoar sebelah barat RS Panti Rapih. Nanik, sapaannya mengaku paham jika yang dilakukannya selama ini tidak tepat. Namun, ia tak punya pilihan untuk memindah lokasi jualan.

Nanik juga mengakui jika tindakannya tak berizin. Maka ia tak bisa berbuat apa-apa jika Satpol PP merazia lapaknya berjualan. "Sering sekali dirazia, tapi mau bagaimana lagi? Pasrah saja, tapi tetap jualan lagi," kata dia.

Sejak dulu ia mencoba mengajukan permohonan izin menggunakan bagian trotoar untuk lapaknya. Namun, permohonan izin tersebut tidak disetujui. "Saya pernah mengajukan izin, tapi kantor sebelah-sebelah ini enggak mau *ngasih* tanda-tangan," kata dia.

"Yang saya lakukan kan bukan tindak kriminal, ya. Mau gimana lagi, enggak ada tempat jualan. Kalau di dalam, mahal."

Senada dengan Nanik, Edo, 34, juga menyatakan hal serupa. Penjual bubur di sebelah selatan Nanik ini juga mengaku paham dirinya melanggar aturan. "Di sini

sudah bertahun-tahun begini, ya saya ngikut saja. Kalau dibilang enggak memberi ruang jalan, ya memang, tapi pemerintah tolong sediakan lokasi lain untuk kami jualan," katanya.

Edo menegaskan tak ingin hanya rakyat kecil yang disalahkan jika fungsi trotoar tak optimal. "Kalau pemerintah mau razia ya silakan, kami juga akan *ngikut*. Tapi setelah itu apa? Kami kan tetap harus jualan, bisa disediakan pujasera atau apa," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah harus tegas, tapi juga bisa memberikan solusi. "Enggak ada yang mau jualan kaki lima itu. Yang ada ya terpaksa," katanya.

Edo dan Nanik sama-sama hampir menghabiskan seluruh ruang trotoar di barat RS Panti Rapih. Mereka hanya memberi satu petak tegel untuk bisa dilewati pedestrian. Lebarnya sekitar 30 sentimeter, hanya bisa dilalui satu orang. Jika berpapasan, salah satu orang harus rela untuk turun ke jalan aspal.

Dicaplok Pedagang

Aisyah, 25, salah seorang pejalan kaki yang melintas, mengaku cukup terganggu dengan warung yang berada di atas trotoar. Ketika seluruh bagian trotoar dicaplok pedagang kaki lima, tak ada lagi yang tersisa baginya untuk melangkah. Mau tak mau, ia harus turun ke aspal. "Padahal trotoar itu hak pejalan kaki," kata dia.

Sejumlah lokasi di Kota Jogja sebenarnya sudah baik dalam menerapkan fungsi trotoar. Misalnya saja di Jalan Suroto, Kotabaru dan Jalan Malioboro.

Sebagai kawasan cagar budaya, Jalan Suroto sejak 2018 lalu disulap menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki. Kini, terdapat tiga jalur pejalan kaki, yaitu di sisi timur dan barat jalan, serta di tengah-tengah jalan sebagai pembatas kedua lajur jalan. Di jalur pedestrian yang tengah, pohon-pohon tinggi banyak menaungi sehingga menghadirkan kenyamanan bagi pejalan kaki yang melintas.

Berdasarkan data Pemkot Jogja, 80% trotoar di Kota Jogja tak memenuhi standar ideal sebagai fungsinya bagi pejalan kaki. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti menyebut sekitar 80% hingga 90% trotoar di Kota Jogja belum layak secara fungsi. Sebab masih banyak PKL dan persil (pertokoan) yang penataannya butuh waktu lama agar bisa memenuhi banyak trotoar dengan baik.

Tak hanya soal fungsi, bahkan secara teknis trotoar di Kota Jogja tak ideal. Umi mengatakan trotoar yang ideal secara fungsi adalah trotoar dengan lebar 1,5 meter, memiliki *guiding block* untuk tunanetra, dengan tinggi 20 sentimeter. (redaksi@harlanjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005